

# MENILAI TAPERERA

## HIGHLIGHTS

Tidak ada perubahan substansi yang signifikan dalam PP teranyar terkait Taperera. Hanya saja revisi PP ini mengindikasikan keseriusan Pemerintah untuk memberlakukan Taperera. Yang menjadi kontroversi adalah: penggalangan dana perumahan dan beban iuran bagi masyarakat, baik warga yang berasal dari pegawai negeri maupun mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta.

Lalu jika diperbandingan dengan skema lain atau benchmarking. Apakah lebih baik dalam membentuk Taperera ataukah lebih baik dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini sudah menyimpan dana pekerja. Apa saja keunggulan Taperera ketimbang institusi lain pengelola dana apbn/publik baik di dalam dan di luar negeri.

Untuk pertanyaan, komentar, dan saran, silahkan hubungi staf redaksi kami, di +62 857-7512-5036 (Laras) atau [office@rpk.org](mailto:office@rpk.org) / Edisi sebelumnya dari RPK Brief dapat diakses di [www.rpk-indonesia.org](http://www.rpk-indonesia.org)

Kantor RPK. Jl. Taman Patra III No.8 B, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. (021) 29410324. Whatsapp: +62 851-6303-5588 (Tiara)



### I

Presiden Jokowi menyetujui PP No. 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024. Regulasi ini mengubah PP sebelumnya yaitu PP No. 25 tahun 2020 tentang Tapera. Tidak ada perubahan substansi yang signifikan dalam PP teranyar ini. Hanya saja revisi PP ini mengindikasikan keseriusan Pemerintah untuk memberlakukan Tapera. Sinyalemen ini dikuatkan banyaknya Menteri dan pejabat yang

turut mengampanyekan Tapera, meski masyarakat menolak keras. Di antara yang telah bersuara adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menparekraf Sandiaga Uno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Lebih Spesifik bahkan Moeldoko mengatakan paling lambat pemberlakuan Tapera di tahun 2027 (31/5).

Terkait iuran Tapera, Dirjen Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan Pemerintah tidak terburu-buru menarik iuran Tapera. Mengingat aturan pelaksanaannya



untuk golongan ASN dan TNI/Polri masih digodok Kemenkeu, sedangkan untuk golongan pekerja swasta serta pekerja mandiri menjadi kewenangan Kemenaker.

2

Terkait pengelolaan dana Tapera, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan iuran Tapera akan masuk ke APBN, kemudian disalurkan ke Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sejak beroperasi

pada tahun 2019, Badan Pengelola (BP) Tapera telah memiliki 4,02 juta peserta aktif, 1,02 peserta pensiun atau ahli waris. Dana peserta aktif sebesar Rp8,18 triliun dan dana peserta pensiun atau ahli waris sebesar Rp2,69 triliun.

Sementara itu, BP Tapera juga menerima pendanaan dari alih dana kelola Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), modal kerja dari Pemerintah melalui APBN 2018, dan dana FLPP yang telah digelontorkan

sejak 2010 hingga kuartal I-2024 sebesar Rp105,2 triliun.

3

Dana Tapera pensiunan PNS Macet, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dana tabungan Tapera dari 124.960 peserta dengan total nilai sebesar Rp567,5 miliar macet. Tabungan milik pensiunan PNS tersebut belum dapat dicairkan BP Tapera meski masa keanggotaan mereka telah selesai di tahun 2021. BPK juga menemukan sebanyak 40.266 peserta pensiun ganda belum bisa mencairkan dana Tapera yang berjumlah total Rp.130,25 miliar. Hal ini mengakibatkan para pensiunan PNS/ahli warisnya tidak dapat memanfaatkan pengembalian tabungan Tapera tersebut.

4

Tuntutan keterbukaan informasi Tapera, Komisi Informasi (KI) menuntut Pemerintah terbuka atas kebijakan Tapera, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Komisioner KI Pusat, Rospita Vici Paulyn mengatakan sampai saat ini Pemerintah tidak membuka mekanisme pembuatan kebijakan Tapera secara gamblang. Harusnya, Pemerintah punya master plan Tapera yang jelas dari awal sampai akhir. Kebijakan ini juga dirasa tidak menghiraukan aspirasi masyarakat luas, terutama dari pekerja yang sudah memiliki rumah atau memilih tidak memiliki rumah.

5

Demo tolak Tapera, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama ribuan buruh Jabodetabek menggelar demo menolak Tapera di depan Istana Negara, Kamis (6/6). Aksi ini juga diikuti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Petani Indonesia (SPI) dan organisasi perempuan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, kebijakan Tapera merugikan dan membebani buruh. Karena, meski telah mengiur 10-20 tahun, buruh tetap tidak diberikan kepastian memiliki rumah. Dia menilai, kebijakan Tapera akan membuat Pemerintah lepas tangan dalam menyediakan rumah untuk rakyat. Lengkapnya, ada 5 tuntutan buruh dalam demonstrasi ini yaitu; (1) Menolak Tapera, (2) Menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, (3) Menolak Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, (4) Menolak Omnibus Law/UU Cipta Kerja, (5) Penghapusan outsourcing atau tolak upah murah (HOSTUM).

Aliansi Buruh Tangerang menggelar aksi demonstrasi menolak Tapera karena dinilai belum jelas manfaatnya. Sedangkan di sisi lain Tapera dianggap menambah beban pekerja yang saat ini telah terbebani banyaknya potongan pajak.

2

PP Muhammadiyah Menarik seluruh dana dari Bank Syariah Indonesia (BSI). PP Muhammadiyah beralasan bahwa pertimbangan 'risiko' menjadi landasan utama keputusan ini. Pengamat menilai langkah PP Muhammadiyah ini akan berdampak langsung ke penurunan likuiditas dan pembiayaan BSI. Hal ini sekaligus menjadi alarm bahaya untuk BSI karena bisa memicu rush terhadap nasabah lain.

6

Rekor defisit fiskal APBN 2025, Banggar DPR menyoroiti defisit APBN 2025 yang dirancang ada pada kisaran 2,45-2,82% dari PDB, atau bernilai lebih dari Rp600 triliun. Defisit APBN transisi ini tercatat sebagai yang tertinggi di sepanjang sejarah. Tampak ketika dibandingkan dengan APBN tahun 2015 yang defisitnya di angka 2,32% atau Rp257,6 triliun.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monorafa lantas meminta Kemenkeu menurunkan defisit APBN 2025 hingga di kisaran 1,5-1,8% dari PDB. Menkeu Sri Mulyani hanya menanggapi singkat, pihaknya akan membahas usulan tersebut. Sedangkan Wamenkeu Suahasil Nazara menegaskan pihaknya

akan tetap pada hitungan semula yang sudah tertera dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yakni defisit APBN 2025 di kisaran 2,45-2,82%.

## HUKUM

KPK menetapkan 14 tersangka baru kasus korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta api Jawa, Sumatera dan Sulawesi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Identitas lengkap para tersangka belum dirilis, Kepala Kantor Pemberitaan KPK Ali Fikri hanya mengungkapkan para tersangka tersebut terdiri dari pegawai Kemenhub, 2 orang pihak korporasi dan 1 orang swasta.

Penetapan ini adalah pengembangan dari OTT KPK di DJKA BTP Semarang pada April 2023. Di antara yang terjerat adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi; PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah. Saat itu KPK berhasil menangkap 10 pelaku dan sudah diadili oleh Pengadilan Tipikor.

## EKONOMI

PP Muhammadiyah Menarik seluruh dana dari Bank Syariah Indonesia (BSI). PP Muhammadiyah beralasan bahwa pertimbangan 'risiko' menjadi landasan utama keputusan ini. Selain itu, kedekatan bank dengan umat, terutama UMKM, juga menjadi pertimbangan. Terhitung sejak 30 Mei 2024, PP Muhammadiyah secara organisasi mulai menarik dana mereka di BSI yang totalnya mencapai Rp214,6 triliun dan mengalihkannya ke sejumlah bank

syariah lain. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, sudah saatnya PP Muhammadiyah tidak lagi mendukung bank syariah milik negara.

Wadirut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menanggapi, langkah Muhammadiyah ini berisiko diikuti masyarakat. Sehingga bisa menimbulkan risiko besar untuk industri perbankan di tanah air. Sedangkan Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda mengatakan langkah PP Muhammadiyah ini akan berdampak langsung ke penurunan likuiditas dan pembiayaan BSI. Hal ini sekaligus menjadi alarm bahaya untuk BSI karena bisa memicu rush terhadap nasabah lain.

## Highlights

**01** Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda menyoroti rencana perubahan status Jakarta. Menurut Syaiful, perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus tidak akan banyak mengubah tantangan yang harus dihadapi Gubernur Jakarta yang baru. Setidaknya selama 10 tahun ke depan, kata Syaiful, Jakarta akan tetap menjadi kota impian para perantau untuk mengadu nasib.

“Jadi saya kira, persoalannya akan

tetap sama. Pengangguran, kemiskinan, dan akses ekonomi masih akan menjadi tantangan bagi gubernur yang baru,” kata Syaiful.

Itu mengapa akses terhadap ekonomi tetap menjadi faktor krusial dalam peta pembangunan Jakarta ke depan. Gubernur yang baru nantinya perlu memastikan pemerataan ekonomi bagi masyarakat miskin kota agar kesenjangan di kota metropolitan tidak semakin menebal. Akses ruang hidup tidak boleh lagi

membedakan si miskin dan si kaya. Jakarta harus menjadi rumah bagi semua golongan.

“Jakarta harus jadi milik bersama dalam strata sosial apapun. Jadi ruang publik yang setara bisa milik banyak orang itu menjadi penting,” tambahnya.

Selain persoalan akses ekonomi, masalah-masalah kronis di Jakarta juga membutuhkan penyelesaian segera. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menurut Syaiful, sebetulnya sudah cukup baik dalam menghadapi persoalan kronis ini, termasuk soal polusi udara dan kemacetan.

**02** Dalam dua persoalan ini, Anies sudah menciptakan terobosan membangun akses transportasi publik yang saling terkoneksi mulai dari Transjakarta, Jak Lingko, hingga MRT. Langkah ini hanya perlu ditambah dengan satu kebijakan lain yang memihak kepada pengguna transportasi publik, misalnya pembatasan kendaraan umum.

“Tentu harus ada keberanian untuk membikin regulasi untuk membatasi kendaraan pribadi dan transportasi umum harus terus di-perbagus,” imbuh Syaiful.

Anies juga sudah cukup baik dalam mengatasi problem pendidikan di Jakarta. Sudah ada Kartu Jakarta Pintar (JKP) dan JKP Plus yang bisa digunakan masyarakat Jakarta untuk mengakses pendidikan. Kartu ini juga tidak hanya dapat dimanfaatkan di sekolah negeri, melainkan juga di sekolah swasta. Tantangannya hanya

tinggal menambah sinergi dengan sekolah swasta agar akses terhadap pendidikan semakin merata.

“Beberapa kebijakan yang sifatnya mengafirmasi sekolah swasta disamakan perlakuannya oleh pemerintah daerah itu saya kira langkah yang terbaik untuk saat ini,” terang Syaiful.

**03** Sisanya soal banjir dan akses air bersih yang merata perlu mendapatkan perhatian serius dari pemimpin Jakarta yang baru. Dua hal ini perlu disinergikan dengan rencana pembangunan Jakarta sebagai kota aglomerasi. Dengan status Jakarta sebagai kota aglomerasi, menurut Syaiful, persoalan ini mestinya bisa segera diselesaikan.

“Mau gak mau Jakarta harus membangun kerja sama dengan daerah-daerah terdekat Jakarta. Itu yang paling mungkin dilakukan karena risiko semakin banyak pengeboran untuk penyediaan berisiko semakin turunnya permukaan tanah di Jakarta,” pungkas Syaiful. Dengan APBD Jakarta yang setiap tahunnya selalu lebih dari Rp 80 triliun, kata Syaiful, segala persoalan ini harusnya bisa diselesaikan.



OLEH: SUGENG BAHAGIJO

*Direktur Rumah Politik  
Kesejahteraan RPK)*

# Tapera Untuk Siapa

Kebutuhan perumahan di Indonesia memang penting dan mendesak. Apalagi di wilayah perkotaan, kebutuhan perumahan tidak bisa ditunda lagi. Layak kiranya jika pemerintah membuat regulasi. Sejak tahun 2011, pemerintah sudah memulai kebijakan dengan sebuah UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dan selanjutnya UU tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, dan akhirnya dengan Peraturan Pemerintah tahun 2020 tentang Penyelenggara Tapera. Regulasi bertujuan antara lain; (i) mengumpulkan dana tabungan dari masyarakat; dana tersebut akan dikembangkan atau diinvestasikan sehingga pembangunan perumahan tidak bergantung kepada

APBN. Itulah sebabnya, Pemerintah melansir Tabungan Perumahan atau Tapera. Badan Pengelolanya sudah terbentuk. (<https://www.tapera.go.id/dasar-hukum/>) Biasanya regulasi memuat beberapa aspek yang berdampak kepada warga. Bagian ini yang harus dihitung dengan hati-hati. Yang menjadi kontroversi adalah: penggalangan dana perumahan dan beban iuran bagi masyarakat, baik warga yang berasal dari pegawai negeri maupun mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta.

Yang menjadi kontroversi adalah: penggalangan dana perumahan dan beban iuran bagi masyarakat, baik warga yang berasal dari pegawai

**Yang menjadi kontroversi adalah: penggalangan dana perumahan dan beban iuran bagi masyarakat, baik warga yang berasal dari pegawai negeri maupun mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta.**



negeri maupun mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta.

Bagaimana kita menilainya? Setidaknya ada 5 pokok pertimbangan yang perlu digunakan untuk menilai layak tidaknya Tapera. Pertama, Kebijakan publik umumnya dinilai dari adil atau tidak. Artinya seberapa

jauh ia memberi kemudahan dan manfaat kepada Masyarakat. Atau sebaliknya seberapa jauh ia memberatkan masyarakat. Termasuk golongan pendapatan menengah dan kurang mampu. Kedua, pada tingkat kelembagaan-operasional, Kebijakan publik akan diukur dari seberapa jauh

Peran Negara. Apakah negara ikut serta melakukan iuran dana ataukah ikut melakukan investasi dana, baik sebagai modal awal atau sebagai skema subsidi. Apakah ada dana APBN ikut serta. Jika tidak ada dana APBN serupiahpun, pertanyaannya mengapa?

Ketiga, Dari aspek asal usul kebijakan, sebuah kebijakan publik dapat dinilai dari apakah ia berbasis data valid. Misalnya, apakah ada data hasil survei warga yang telah dikerjakan untuk mengetahui ability to pay (tingkat daya beli) dan willingness to pay (tingkat kesediaan membeli) perumahan. Kebijakan publik seperti Tapera mengenakan atau mewajibkan biaya kepada masyarakat, apakah besaran biaya tersebut sudah dihitung dengan cermat. Sering disebut sebagai ability to pay.

Keempat, perbandingan dengan skema lain atau benchmarking. Apakah lebih baik dalam membentuk Tapera ataukah lebih baik dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini sudah menyimpan dana pekerja. Apa saja keunggulan Tapera ketimbang institusi lain pengelola dana apbn/publik baik di dalam dan di luar negeri.

Kelima, Kebijakan publik juga diukur dari seberapa jauh kinerja dan rekam jejak Lembaga pelaksana atau orang-orang yang memimpin lembaga tersebut, misalnya BP Tapera sebagai pelaksana program Tapera, memiliki rekam jejak yang baik. Bersih dari korupsi. Kasus Asabri dan Jiwasraya menjadi trauma sosial bagi masyarakat, karena dananya diselewengkan.



## REKOMENDASI DAN USULAN

### 1. TAPERA HARUS DIRUBAH DAN DIPERBAIKI

Dengan semangat Pemerintah dan kebijakan publik bertujuan Melayani Warga maka Tapera sebaiknya dirubah dan diperbaiki. Baik pada aspek Sumberdana, Kelembagaan dan Operasionalnya. Terutama kepada pada asumsi-asumsi/skema sumber dana, bersifat wajib tidaknya warga ikut menabung dan data-data daya beli warga, yang menjadi dasar-dasar dan asumsi program Tapera.

### 2. MERUBAH SKEMA IURAN

Sumber dana Tapera. Negara dalam hal ini APBN harus hadir dan ikut serta dalam Tabungan Perumahan. Pilihan skema terbaik kiranya adalah skema 50/50. Sebagai contoh, Jika warga setiap tahun mengumpulkan 10 juta, maka tiap tahun pemerintah ikut memberikan iuran Rp. 10 juta/warga. Atau Jika Tabungan perumahan per tahun berhasil menabung dana warga Rp. 10 Triliun, maka APBN akan ikut



iuran sebesar Rp.5 trilliun.

### 3. IURAN JANGAN MENAMBAH BEBAN WARGA

Mengurangi Beban Warga. Tabungan Tapera harus diperbandingkan dan dikaitkan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab beban pekerja swasta dan industri sudah dikumpulkan dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Intinya karyawan dan warga sudah dikenakan berbagai iuran dari gajinya tiap bulan.

### 4. TAPERA BERSIFAT FLEKSIBEL—BUKAN KEWAJIBAN WARGA.

Wajib vs Sukarela. Tabungan Tapera sebaiknya tidak bersifat kewajiban bagi pekerja swasta. Apalagi jika dana APBN (subsidi) tidak ikut serta dalam tabungan perumahan. Setidaknya dibuat 5-10 tahun sebagai Sukarela dan selanjutnya akan dilaksanakan sebagai kewajiban. Dalam waktu 5 tahun untuk menjadi bukti bahwa Kinerja lembaga BP Tapera menang oke. Dan juga ada hasil nyata berupa perumahan warga yang dibangun dengan Dana Tapera.

### 5. HARUS ADA PERWAKILAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA.

Pentingnya wakil warga dalam Tata Kelola BP Tapera. Selain wakil pemerintah yang membawahi bidang keuangan dan hukum, maka wakil wakil warga dan karyawan harus duduk dalam badan pengawas dan badan pengelola. Terlalu sering kita mengalami salah-urus dan salah-kelola dalam berbagai dana-dana publik.

### 6. MEMASTIKAN KESEDIAN DAN DUKUNGAN MASYARAKAT

Presiden Jokowi dan BP Tapera melaksanakan survei warga untuk mengetahui tingkat daya beli warga atas perumahan dan kesediaan warga untuk menabung perumahan. Sedikitnya survei warga dengan sample 30-40 ribu warga akan cukup untuk memperoleh Gambaran dan data tentang derajat ability to pay warga dan juga willingness to pay warga kepada perumahan..



Kantor RPK. Jl. Taman Patra III No.8 B,  
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.  
(021) 29410324. Whatsapp: +62 851-  
6303-5588 (Tiara)